BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan RTH sangat penting pada suatu wilayah perkotaan. Disamping sebagai salah satu fasilitas sosial masyarakat, RTH kota mampu menjaga keserasian antara kebutuhan ruang aktivitas masyarakat kota dengan kelestarian bentuk lansekap alami wilayah itu. RTH kota juga memiliki berbagai manfaat seperti kenyamanan, estetika, hidrologis, klimatologis, ekologis, protektif, edukatif, kesehatan, dan wisata.

Keberadaan RTH yang diwajibkan 30% dari luas wilayahnya berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan proporsi tersebut dapat mengatasi dampak-dampak negatif yang akan muncul di wilayahnya. Dampak yang akan ditimbulkan, yaitu berkaitan dalam hal kesegaran udara telah dipenuhi oleh karbondioksida kendaraan bermotor dan industri, dalam hal penyediaan resapan air, dan juga dalam hal mengatasi genangan-genangan atau banjir disaat musim hujan. Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang secara kuantitas kurang dari proporsi yang ideal menjadi permasalahan di suatu perkotaan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan yang dilakukan tidak diimbangi dengan pengalokasian RTH.

Pembangunan yang terjadi saat ini dikarenakan oleh pemenuhan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam pembangunan dan penataan ruang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang ada. Akan tetapi, seharusnya pembangunan yang terjadi memperhatikan daya dukung lingkungan kota antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan kota. Pengalokasian lahan RTH publik sering dikalahkan dengan peruntukan lahan lainnya dalam pembangunan kota, sehingga terjadi peralihfungsian lahan RTH publik menjadi kawasan lainnya.

Kegiatan pengembangan RTH publik tidak terlepas dari kebijakan dan rencana penataan ruang. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar

serius dalam menata kotanya dengan mempelajari dan mengelola RTH publik dengan baik dan menjadi satu kesatuan dan sejajar dengan perkembangan kota.

Komponen-komponen pengaturan yang harus diperhatikan dalam penyediaan dan pengelolaan RTH adalah pengaturan teknis dan pengaturan penyelenggaraan. Pengaturan teknis meliputi bentuk-bentuk, standar kebutuhan, dan alokasi lahan RTH kota. Pengaturan penyelenggaraan meliputi pengelolaan RTH (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat (Fahrentino, 2003). Komponen-komponen tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keberadaan RTH.

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta menjadikan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai wilayah yang padat akan kegiatan dengan fungsinya sebagai pusat perdagangan, industri, jasa, dan permukiman, sehingga perkembangan Kota Administrasi Jakarta Timur sangat cepat sekali terdesak oleh arus pembangunan kota. Salah satunya dikarenakan oleh jumlah penduduk Kota administrasi Jakarta Timur yang selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk yang ada cukup besar dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya yang menimbulkan dampak terhadap keberadaan RTH publik dalam melakukan pembangunan, yaitu ditunjukan dengan danya peralihan fungsi taman dan jalur sebesar 185,42 Ha (Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, 2010). Pembangunan yang dilakukan membawa dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan, seperti meningkatkan polusi udara, meningkatnya suhu udara, meluasnya wilayah banjir, dan makin mendangkalnya permukaan air tanah serta meluasnya wilayah permukiman kumuh.

Kegiatan pengembangan Kota Administrasi Jakarta Timur tidak terlepas dari kebijakan dan rencana penataan ruang Provinsi DKI Jakarta. Melihat kondisi penanganan pengelolaan RTH publik yang ada saat ini belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif, karena keadaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur yang sebagian besar telah dikuasai masyarakat dan sudah menjadi daerah terbangun, sehingga ketersediaan lahan bagi RTH publik baik dari segi kuantitas maupun kualitas RTH publik cenderung menurun. Dengan begitu, dibutuhkan

adanya penelitian mengenai **"Strategi Pengelolaan RTH Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur"** untuk merumuskan strategi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan komponen pengaturan teknis (aspek fisik dan fungsi) dan pengaturan penyelenggaraan (manajerial) agar dapat mempertahankan, mengembangkan, dan menata RTH Kota seefektif mungkin sehingga fungsi RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur akan menjadi optimal dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan RTH publik.

1.2 Perumusan Permasalahan

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan bagian wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi kota sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa serta permukiman. Keadaan tersebut menyebabkan kawasan menjadi tidak terkendali akibat perkembangan Kota Administrasi Jakarta Timur yang sangat cepat sejalan pertambahan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya. Keadaan tersebut mempengaruhi keadaan RTH publik yang ada, sehingga ketersediaan lahan bagi RTH publik baik dari segi kuantitas maupun kualitas RTH publik cenderung menurun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola RTH publik dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai dan sejalan dengan perkembangan kota yang tidak terlepas dari kebijakan dan rencana penataan ruang Provinsi DKI Jakarta. Dengan kondisi yang ada, penanganan pengelolaan RTH publik saat ini belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu strategi pengelolaan RTH publik sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan RTH publik. Komponen pengaturan pengelolaan RTH publik adalah komponen teknis dan komponen penyelenggaraan. Dengan begitu, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan jawaban dari pertanyaan "Bagaimana strategi pengelolaan RTH publik yang dapat diterapkan di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan komponen pengaturan teknis (aspek fisik dan fungsi) dan pengaturan penyelenggaraan (manajerial) RTH ? Dari pertanyaan tersebut maka pertanyaan lain yang akan muncul dalam penelitian ini, yaitu:

a. Apakah bentuk RTH publik yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, luasannya, dan lokasinya ?
b. Bagaimana kapasitas pengelolaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur ?
c. Sejauh mana pengembangan dan pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan aspek fisik, fungsional, dan manajerial ?
d. Bagaimana strategi pengelolaan RTH publik yang dapat diterapkan di Kota Administrasi Jakarta Timur?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian berjudul "Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur " adalah untuk merumuskan strategi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan komponen pengaturan teknis (aspek fisik dan fungsi) dan pengaturan penyelenggaraan (manajerial). Sehingga sasarannya, yaitu:

a. Teridentifikasinya bentuk dan luasan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur.
b. Teridentifikasinya kapasitas pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi legalitas, prosedural, kelembagaan, dan pembiayaan.
c. Teridentifikasinya kondisi eksisting pengelolaan setiap RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan aspek fisik, fungsional, dan manajerial.
d. Merumuskan strategi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah untuk penelitian adalah terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 10

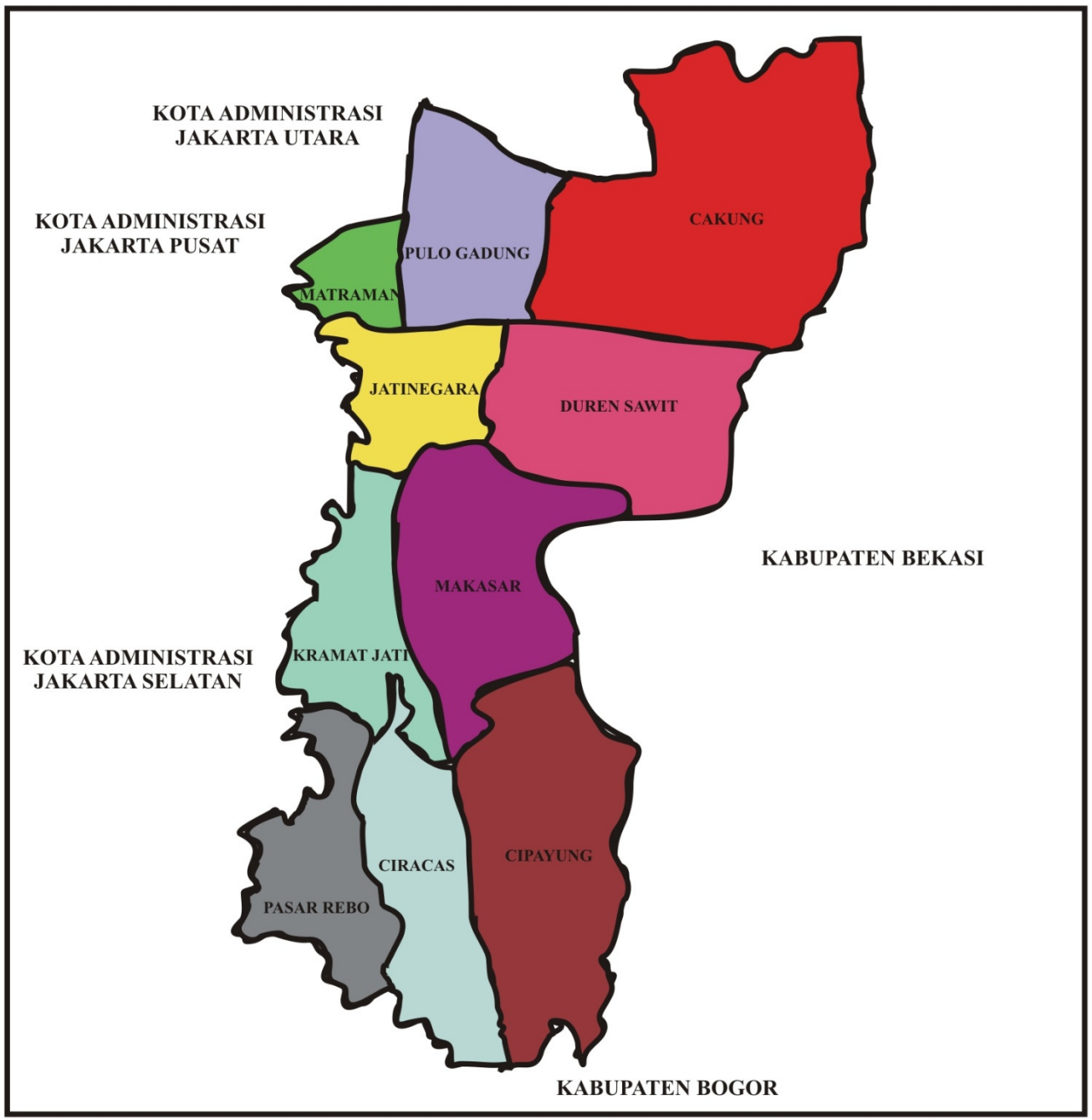
(sepuluh) kecamatan, yaitu terdiri dari Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulogadung, Kecamatan Matraman, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Makasar, Kecamatan Kramatjati, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, dan Kecamatan Cipayung. Kota administrasi Jakarta Timur memiliki kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Tujuan penelitian adalah merumuskan strategi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka batasan pengelolaannya berdasarkan aspek fisik, fungsi, dan manajerial. Pengelolaan aspek fisik adalah hanya sebatas pengelolaan kondisi fisik RTH (sebaran, kuantitas, kualitas dan fasilitas RTH publik). Aspek fungsional yaitu kesesuaian pengelolaan fungsi RTH dengan rencana yang sudah ditetapkan. Aspek manajerial yaitu meliputi aturan yang mengatur (legalitas), prosedur pengelolaan (procedural), lembaga yang mengelola (kelembagaan), dan pembiayaan dalam pengelolaan.

Selain batasan pengelolaan, dalam hal mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka kajian strategi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi kapasitas pengelolaan RTH publik.
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan suatu strategi berdasarkan Identifikasi potensi dan permasalahan pengelolaan RTH publik yang didasarkan oleh kondisi eksisting pengelolaanya.
c. Rumusan strategi pengelolaan RTH publik.



PETA ORIENTASI WILAYAH STUDI

GAMBAR 1.1

LEGENDA

- KEC. CAKUNG
- KEC. DUREN SAWIT
- KEC. PULO GADUNG
- KEC. MATRAMAN
- KEC. JATINEGARA
- KEC. MAKASAR
- KEC. KRAMAT JATI
- KEC. CIPAYUNG
- KEC. CIRACAS
- KEC. PASAR REBO



U

NO SCALE

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2010

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode primer dan metode sekunder. Berikut adalah penjelasannya:

a. Data Primer

Pengumpulan data dengan menggunakan metode primer, yaitu dengan melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada instansi terkait. Observasi yang dilakukan untuk melihat kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau publik yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di Jakarta Timur kemudian di dokumentasikannya.

Selain itu, melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau, yaitu kepada Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan, Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur serta pengelola RTH publik. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui semua yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk pembiayaan, serta kebijakan-kebijakannya.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan yaitu dengan meminta data/dokumen berupa *softcopy* maupun *hardcopy* yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau kepada dinas-dinas terkait, yaitu pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur, serta dokumen rencana mengenai Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Timur kepada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan melakukan studi literatur RTH yang terkait dengan pengelolaan RTH di perkotaan kajian literatur terhadap buku-buku,

laporan-laporan penelitian, artikel hasil browsing dan data-data statistik, serta kelengkapan lainnya yang menunjang terhadap penelitian.

1.5.2 Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran secara utuh mengenai kondisi pengelolaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga dapat diketahui potensi dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Perumusan strategi tidak terlepas dari pengaruh kondisi eksisting dan perkembangan di wilayah studi. Diharapkan keluaran dari studi ini, dapat menjawab permasalahan penataan dan pengelolaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kawasan, tetapi tetap tidak mengabaikan kebijakan pemerintah yang telah ada selama ini.

Metode analisis data yang digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah dengan menggunakan analisis SWOT atau *manajemen strategic*. Perumusan strategi ini mempergunakan Strategic Managemen, yang meliputi analisis *Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT), sehingga akan diketahui kondisi yang ada dan usaha yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi RTH publik dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam bentuk strategi pengelolaan RTH publik. Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai setiap sasaran adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi bentuk RTH publik yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu dengan mengidentifikasi teori-teori dasar yang berkaitan dengan RTH publik dan jenis-jenis/bentuk-bentuk ruang terbuka hijau yang ada di kawasan perkotaan.
b. Identifikasi kapasitas pengelolaan RTH publik digunakan untuk mengetahui penyelenggaraan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu dengan mengidentifikasi aspek yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pengelolaan RTH publik secara utuh, meliputi legalitas, prosedural, kelembagaan, dan pembiayaan pengelolaan.
c. Identifikasi kondisi eksisting pengelolaan setiap RTH publik yang ada untuk mengetahui sejauh mana pengembangan dan pengelolaan untuk setiap RTH

publik agar dapat diketahui potensi dan permasalahan pengelolaannya, yaitu dengan mengidentifikasi kondisi fisik, fungsional, dan manajerialnya.

d. Merumuskan strategi pengelolaan RTH publik dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan data potensi dan permasalahan setiap RTH publik yang ada didapat dari studi normative dan berdasarkan kondisi eksisting. Potensi dan permasalahan dirangkum menjadi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) di dalam matriks SWOT yang akan menghasilkan strategi *strengths-opportunities* (S-O), *weaknesses-opportunities* (W-O), *strengths-threats* (S-T), dan *weaknesses-threats* (W-T).

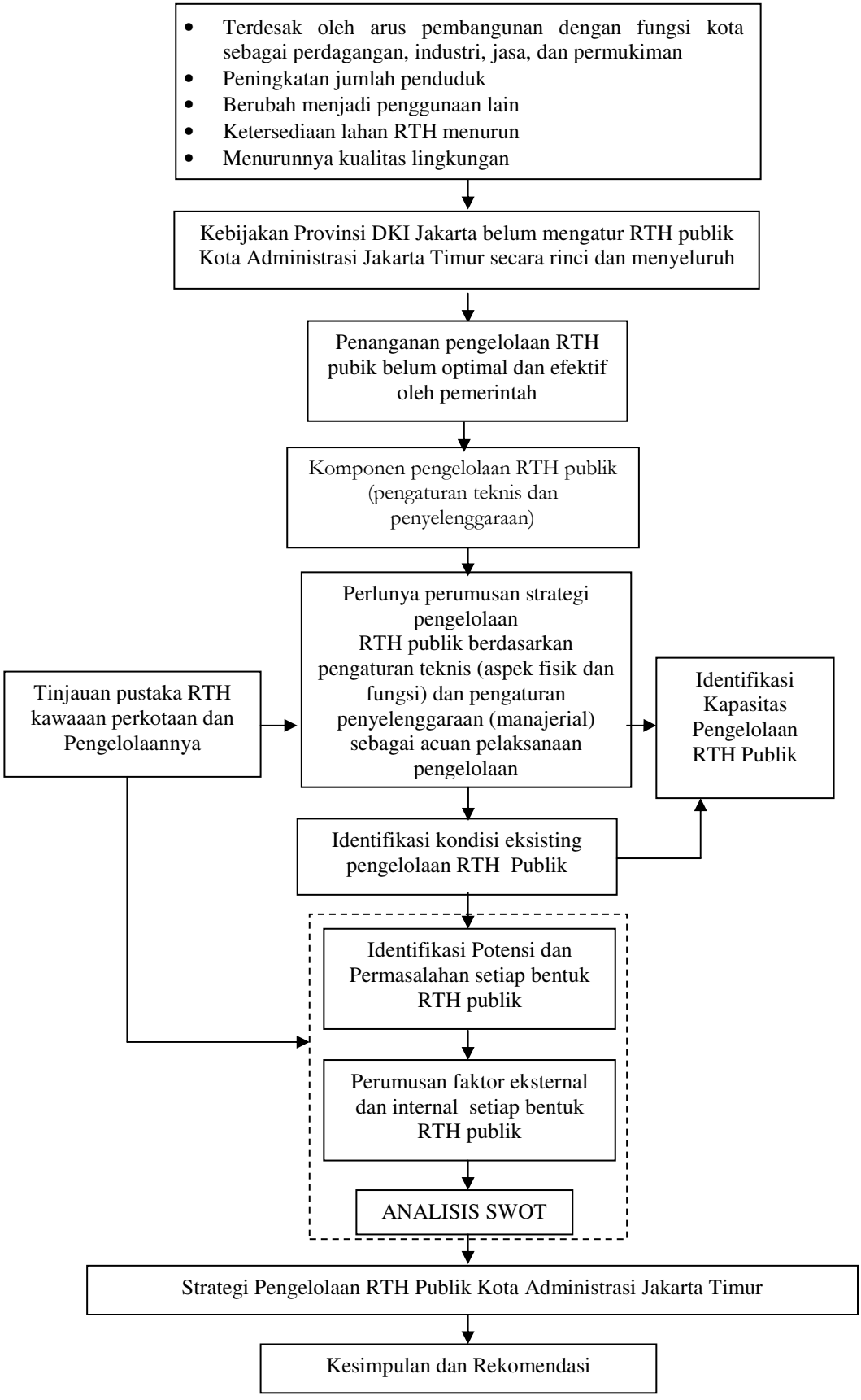
Tabel 1.1
Metode Analisis Studi

Sasaran	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
Teridentifikasinya bentuk dan luasan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur	Konsepsi RTH publik Jenis-Jenis RTH Publik	Buku teks, laporan penelitian, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Suku Dinas Pertamanan, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan, website	Kajian Literatur Data Sekunder	Deskriptif Kualitatif
Teridentifikasinya kapasitas pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi legalitas, prosedural, kelembagaan, dan pembiayaan.	Legalitas Prosedural Kelembagaan Pembiayaan	Bappeda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Suku Dinas Pertamanan, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan, pengelola, Kecamatan, website	Kajian Literatur Wawancara Data sekunder	Deskriptif Kualitatif
Teridentifikasinya kondisi eksisting pengelolaan setiap RTH publik di Kota Administrasi	Aspek fisik Aspek Fungsional	Bappeda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Suku Dinas Pertamanan,	Kajian Literatur Wawancara	Deskriptif Kualitatif

Sasaran	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis
Jakarta Timur	Aspek Manajerial	Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kecamatan, pengelola,	Observasi Data sekunder	
Merumuskan strategi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur	Potensi dan Permasalahan RTH publik	Buku teks, website, Bappeda, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Suku Dinas Pertamanan, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kecamatan, pengelola,	Hasil analisis potensi dan permasalahan RTH publik	Analisis SWOT

Sumber: Hasil Olahan, 2010

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2
Bagan Kerangka Pemikiran

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian mengenai "Strategi Pengelolaan RTH Publik Kota Administrasi Jakarta Timur" Studi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran studi, metodelogi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bab ini membahas mengenai konsepsi RTH (pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat) yang terkait dengan ruang terbuka hijau, jenis-jenis RTH berdasarkan kebijakan nasional terbaru, standar kebutuhan RTH, aspek-aspek yang mendukung pengelolaan RTH (legalitas, prosedural, kelembagaan, dan pembiayaan), dan strategi pengelolaan RTH dengan matriks SWOT.

BAB III PENGELOLAAN RTH PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi aspek fisik dasar, kependudukan, penggunaan lahan, RTH publik yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, kapasitas pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, dan kondisi pengelolaan RTH publik Kota Administrasi Jakarta Timur.

BAB IV PERUMUSAN STRATEGI PENGELOLAAN RTH PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Bab ini membahas mengenai hasil studi meliputi identifikasi potensi dan permasalahan setiap jenis RTH publik berdasarkan kondisi eksisting pengelolaan RTH, analisa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), perumusan strategi pengelolaan setiap RTH publik dan perumusan strategi

pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur yang didapat dari hasil persamaan strategi.

BAB V KESIMPULAN

Bab 5 berisi mengenai kesimpulan dari hasil studi yang telah dilakukan dan rekomendasi dalam pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur.